

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi suatu negara, terutama dalam proses pemilihan umum. Partai-partai ini menjadi wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Dalam pemilu, partai-partai bersaing untuk memperoleh dukungan dari pemilih agar dapat memenangkan kursi di parlemen. Pemilu merupakan mekanisme yang demokratis untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara dan membuat keputusan penting.

Dinamika hasil pemilu mempunyai dampak yang signifikan terhadap partai politik. Hasil pemilu dapat menentukan sukses tidaknya suatu partai di masa depan. Partai-partai yang mempunyai kinerja baik dalam pemilu memperoleh momentum dan dukungan, sementara partai-partai yang mempunyai kinerja buruk mungkin menghadapi gejala internal dan kehilangan kredibilitas. Hasil pemilu juga dapat mempengaruhi strategi, kepemimpinan, dan kebijakan partai ke depan. Penting bagi partai untuk menganalisis dinamika hasil pemilu guna beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka pada pemilu mendatang. Secara keseluruhan, dampak hasil pemilu terhadap partai politik merupakan proses yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang memerlukan pertimbangan cermat dan perencanaan strategis.

Partai Golkar adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai ini awalnya merupakan wadah bagi para anggota TNI dan polisi yang ingin terlibat dalam politik. Pada awal berdirinya, Partai Golkar merupakan partai pemerintah yang mendukung kebijakan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Seiring berjalannya waktu, Partai Golkar mengalami berbagai perubahan dan mengukuhkan diri sebagai partai politik yang memiliki basis massa yang kuat. Sejarah panjang Partai Golkar menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan politik Indonesia.

Perkembangan partai Golkar dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya merupakan perjalanan yang menarik untuk disaksikan. Dalam setiap pemilihan yang dilalui, partai tersebut telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan lanskap politik yang berubah dan tetap menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Kemampuan partai untuk menarik anggota baru dan mempertahankan basis dukungan yang kuat telah menjadi kunci keberhasilannya yang berkelanjutan. Selain itu, aliansi strategis Golkar dengan partai politik lain juga telah memainkan peran penting dalam kemenangannya dalam pemilihan umum. Saat kita melihat ke masa depan, akan menarik untuk

melihat bagaimana partai tersebut terus berkembang dan menavigasi kompleksitas politik Indonesia.

Partai Golkar di era reformasi telah mengalami perubahan dan tantangan yang signifikan. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru, partai tersebut harus beradaptasi dengan lanskap politik baru dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Meskipun menghadapi konflik internal dan perebutan kepemimpinan, Golkar telah berhasil tetap menjadi kekuatan politik terkemuka di Indonesia. Melalui aliansi strategis dan reformasi kebijakan, partai tersebut terus memainkan peran penting dalam membentuk arah politik negara. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap politik, Partai Golkar harus terus beradaptasi dan menjawab kebutuhan serta tuntutan masyarakat Indonesia agar tetap relevan dan berpengaruh.

Partai Golkar berhasil mengamankan 102 kursi DPR RI dan meraih kursi DPRD terbanyak se-Indonesia, naik 17 kursi dibandingkan perolehan Pemilu 2019. Golkar juga menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di tingkat DPRD provinsi. Perolehan kursi DPRD provinsi yang diraih di Pemilu 2024 naik 50 kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 di Pemilu 2019. berhasil menempatkan kader menjadi ketua DPRD di 14 provinsi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, Golkar juga berhasil menempatkan 20 kadernya sebagai wakil ketua DPRD provinsi. Hal ini berarti Golkar berhasil mengamankan posisi pimpinan DPRD di 34 provinsi dari 38 di seluruh Indonesia (Antara, 2024).

Raihan signifikan Partai Golkar di tingkat provinsi juga linier dengan perolehan kursi DPRD di tingkat kabupaten dan kota. Partai Golkar meraih 2.521 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia, atau setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia. Golkar berhasil mencatatkan kenaikan kursi sebanyak 99 kursi atau 4 persen dari perolehan di Pemilu 2019 sebanyak 2.422 kursi. Partai Golkar juga meraih kemenangan di 120 kabupaten/kota se-Indonesia, atau setara 23,7 persen dari 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pileg Kabupaten/Kota di 2024. Artinya otomatis Golkar memiliki 120 Ketua DPRD ditambah 220 wakil ketua DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia (Antara, 2024).

Lonjakan perolehan suara partai Golongan Karya (Golkar) menjadi sorotan publik Raihan suara partai berlambang pohon beringin itu berhasil menduduki posisi kedua dalam rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Golkar pun disorot karena bisa bangkit kembali bangkit setelah mengalami fase penurunan. strategi politik Golkar dalam mendongkrak perolehan suara pada Pileg 2024 kali ini melalui calon legislatif (caleg) berkualitas yang diusung pada berbagai daerah pemilihan (dapil). Hal itu sejalan dengan pendapat Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia. Menurut Adi, caleg yang diusung Golkar merupakan kader terbaiknya dan

beberapa kepala daerah yang memiliki latar belakang historis yang kuat pada daerah sesuai dengan dapilnya. Tidak hanya itu, Golkar juga mengusung keluarga dari sosok yang memiliki hubungan kuat dengan daerah tersebut (CNBC Indonesia, 2024).

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Sulawesi Selatan. Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan kini tak lagi menjadi pemenang Pemilu di Sulsel. Partai yang berlogo pohon beringin kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029. Padahal, sepanjang sejarah Pemilu hingga 2019, Ketua DPRD Sulsel selalu diisi oleh kader Golkar. Pada Pemilu 2024, kursi terbanyak diraih oleh Partai NasDem dengan merebut 17 kursi DPRD Sulsel, bertambah lima kursi dari 12 kursi perolehan Pemilu 2019. Sedangkan Partai Golkar, meraih 14 kursi, bertambah 1 kursi dari 13 kursi perolehan Pemilu 2019. Golkar di Sulsel berhasil menambah kursinya dari Dapil 10. Konflik di internal Golkar Sulsel yang selama ini sengaja dipelihara, menyebabkan suara Golkar stagnan dan hanya bisa menambah satu kursi, padahal potensinya bisa setiap dapil minimal dapat dua kursi (Menit Indonesia, 2024). Untuk level kabupaten/kota di Sulsel, Golkar hanya mampu meraih 7 Ketua DPRD kabupaten/kota. Hasil pemilu 2019 masih jauh lebih baik, dimana Golkar mampu mengunci 10 Ketua DPRD kabupaten/kota, dan 1 Ketua DPRD Sulsel. Tujuh daerah dimana Golkar mengunci Ketua DPRD diantaranya ialah Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Selayar, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara dan Luwu Utara (Sindo Makassar, 2024).

**Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Kursi Pemilu 2019	Kursi Pemilu 2024	Keterangan
1.	<b>BANTAENG</b>	2	4	<b>Meningkat</b>
2.	BARRU	5	5	Tetap
3.	BONE	9	6	Menurun
4.	BULUKUMBA	4	5	Meningkat
5.	ENREKANG	6	4	Menurun
6.	GOWA	3	4	Meningkat
7.	JENEPONTO	6	6	Tetap
8.	KEPULAUAN SELAYAR	10	9	Menurun
9.	LUWU	3	5	Meningkat
10.	LUWU TIMUR	7	4	Menurun
11.	LUWU UTARA	8	11	Meningkat
12.	MAROS	7	6	Menurun
13.	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	8	5	Menurun
14.	PINRANG	5	6	Meningkat
15.	SIDENRENG RAPPANG	5	4	Menurun
16.	SINJAI	4	4	Tetap
17.	SOPPENG	12	11	Menurun
18.	TAKALAR	4	3	Menurun
19.	TANA TORAJA	7	7	Tetap
20.	TORAJA UTARA	5	7	Meningkat
21.	WAJO	4	5	Meningkat
22.	KOTA MAKASSAR	5	6	Meningkat
23.	KOTA PALOPO	5	6	Meningkat
24.	KOTA PAREPARE	5	5	Tetap

*Sumber : Wikipedia*

Di Kabupaten Bantaeng, Partai Golkar juga menjadi salah satu partai yang memiliki andil besar dalam perpolitikan. Hingga Pemilu 2009, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu di DPRD Kabupaten Bantaeng. Namun pada Pemilu 2014 Partai Golkar tidak lagi menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Bantaeng hingga Pemilu 2024 yang baru dilaksanakan. Kursi Partai Golkar cenderung mengalami penurunan, dimana pada Pemilu 2004 menurun dari 16 menjadi 11 kursi, Pemilu 2009 dari 11 menjadi 4 kursi, Pemilu 2014 dari 4 menjadi 3 kursi, hingga di Pemilu 2019 menurun menjadi hanya 2 kursi. Terjadi pelemahan kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Bantaeng karena tergerus oleh partai politik lain seperti PKS, PPP, dan Nasdem.

**Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bantaeng 1999-2024**

PEMILU	JUMLAH KURSI
1999	16
2004	11
2009	4
2014	3
2019	2
2024	4

*Sumber : Wikipedia*

Pada Pemilu 2024, Partai Golkar mengalami kembali peningkatan jumlah kursi dari 2 menjadi 4 kursi. Penambahan kursi ini menjadi hal pertama yang dialami Partai Golkar Kabupaten Bantaeng selama pemilu di era Reformasi. Pada Pemilu 2019 Partai Golkar hanya mendapat kursi di Daerah Pemilihan 2 dan 3. Pada Pemilu 2024 Partai Golkar berhasil kembali mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 1 dan menambah menjadi 2 kursi di Daerah Pemilihan 2 sehingga Partai Golkar Kabupaten Bantaeng mendapatkan 1 kursi di dapil 1, 2 kursi di dapil 2, dan 1 kursi di dapil 3.

**Tabel 3. Perolehan Suara dan Kursi DPRD Partai Golkar Bantaeng 2024**

DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	KURSI YANG DIPEROLEH
BANTAENG 1	BANTAENG	2.228	1
	EREMERASA	1.182	
BANTAENG 2	BISSAPPU	5.706	2
	SINOA	2.471	
	ULUERE	1.890	
BANTAENG 3	GANTARANG KEKE	425	1
	TOMPO BULU	2.006	
BANTAENG 4	PAJUKUKANG	585	-
<b>TOTAL</b>		<b>16.493</b>	<b>4 Kursi</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Bantaeng*

**Tabel 4. Daftar Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bantaeng 2024-2029 dari Partai Golkar**

NO.	NAMA	DAPIL	RAIHAN SUARA	KETERANGAN
1.	SAEFULLAH NUR MUHAMMAD	1	1.892	Caleg baru
2.	RESKI WIJAYA	2	3.357	Caleg baru
3.	H. MUH SAID	2	2.635	Caleg baru
4.	H. SUDARMAN	3	1.541	Petahana

*Sumber : KPU Kabupaten Bantaeng*

Kinerja politik Partai Golkar Kabupaten Bantaeng pada Pemilu 2024 menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena ada beberapa alasan. Pertama, pertama kali dalam pemilu di masa Reformasi, Partai Golkar Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan kursi setelah mengalami penurunan hingga Pemilu 2019. Kedua, peningkatan ini mencapai dua kali lipat atau 100 persen dari 2 kursi menjadi 4 kursi yang tersebar di tiga dapil DPRD Kabupaten Bantaeng. Dibandingkan dengan partai politik lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilu 2024, partai yang ikut mengalami peningkatan kursi adalah Demokrat, PKS, dan Nasdem. Demokrat dan PKS mengalami penambahan 1 kursi, sementara Nasdem mengalami penambahan 3 kursi atau lebih dari dua kali lipat. Namun, fokus penelitian ini ada pada Partai Golkar karena partai ini menjadi partai tertua di DPRD Kabupaten Bantaeng yang selama ini cenderung mengalami penurunan tetapi berubah menjadi peningkatan di Pemilu 2024.

**Tabel 5. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 dan 2024**

PARTAI	Kursi Hasil Pemilu 2019	Kursi Hasil Pemilu 2024
PKB	3	3
GERINDRA	2	1
<b>GOLKAR</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
NASDEM	2	5
PKS	4	5
PAN	4	4
HANURA	1	0
DEMOKRAT	2	3
PPP	5	5

*Sumber : Wikipedia*

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Peningkatan Perolehan Kursi Partai Golkar Kabupaten Bantaeng Pada Pemilu 2024”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilu 2024?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilu 2024.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang strategi partai politik di tingkat lokal maupun nasional.
  - b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang strategi politik yang mengkaji bagaimana faktor ketokohan pemimpin dalam sebuah partai mampu meningkatkan hasil elektoral pemilu.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai strategi politik.
  - b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji strategi sebuah partai politik yang menjadikan aspek ketokohan figur pemimpin menjadi daya tarik mendapatkan suara pemilih dalam pemilu.
  - c. Menjadi acuan keputusan bagi partai politik dalam menentukan strategi politiknya menghadapi pemilu guna meningkatkan perolehan suara dan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
  - d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

## 1.5. Strategi Politik

### 1.5.1. Pengertian Strategi

Secara umum strategi adalah proses penentuan atau sebuah proses untuk menentukan rencana utama yang berfokus terhadap tujuan dalam jangka panjang suatu organisasi, juga disertai oleh penyusunan upaya atau cara yang sedemikian rupa agar tujuan tersebut dapat diwujudkan. Ansoff berpendapat bahwa strategi adalah suatu common thread antara organisasi dan pasar produk yang menjelaskan hakekat dimana suatu organisasi berada akan ada di masa depan. Ia juga mendeskripsikan strategi sebagai ketentuan guna dasar penyusunan suatu keputusan serta penetapan daro pedoman umum (Rahman, 2017).

Rue dan Holland kemudian menyimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah suatu penentuan serta evaluasi dari berbagai macam alternatif cara guna mencapai misi atau tujuan. Sementara itu, Glueck dan Jauch (1984) mengartikan strategi sebagai sebuah kesatuan rencana yang menyeluruh serta terintegrasi dan menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan situasi atau lingkungan yang sedang dihadapinya. Sehingga memberikan arti bahwa strategi merupakan penyesuaian antara suatu organisasi dengan lingkup eksternalnya (Effendi, 2021).

### 1.5.2. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Koteen terdapat beberapa tipe strategi antara lain; Pertama, *Corporate Strategy* (strategi organisasi) adalah strategi yang berkaitan dengan penyusunan misi, tujuan, nilai serta nilai-nilai dari banyaknya inisiatif strategi yang baru pembahasan ini diperlukan, yaitu apa saja yang dilakukan serta kepada siapa. Kedua, *Program Strategy* (strategi program) menjelaskan tentang strategi yang lebih memperhatikan kepada implikasi-implikasi strategi dari program tersentu yang kemudian dianalisis seperti apa dampaknya apabila suatu program tersebut dilakukan serta seperti apa dampaknya bagi sasaran suatu organisasi. Ketiga, *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) adalah strategi yang lebih mengutamakan pada pengoptimalan pemanfaatan sumber daya essential yang tersedia berupa teknologi, keuangan dan tenaga untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi dari suatu organisasi. Keempat, *Institutional Strategy* (strategi institusi) adalah strategi yang memfokuskan pengembangan kemampuan dari organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang strategis (Afnan,2017).

### 1.5.3. Pengertian Strategi Politik

Peter Schroder adalah seorang pakar strategi politik yang mempopulerkan strategi politik. Menurutnya, strategi politik adalah kerangka dari langkah-langkah atau rencana yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik. Dalam segi pemerintahan strategi diperlukan untuk pemberlakuan tata aturan perundang-undangan dan pembentukan suatu kelembagaan baru dalam birokrasi pemerintahan. Contohnya yaitu adanya pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, desentralisasi, dijalankan program pemerintah deregulasi, pemberlakuan peraturan baru.

Pandangan lainnya menurut Prihatmoko dan Moessafa menilai bahwa strategi politik adalah rencana serta tindakan yang dilakukan untuk mendapat kemenangan dalam suatu pemilihan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut maka strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang wajib ditempuh untuk mencapai target yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran komprehensif yang sesuai dengan pola keputusan yang diambil guna mencapai dan mewujudkan suatu tujuan, strategi juga memiliki tujuan yang utama yaitu mencapai sebuah kemenangan.

### 1.5.4. Jenis-Jenis Strategi Politik

Strategi politik yang digunakan dalam ranah politik juga meliputi *political branding*, ketokohan isu politik, maupun marketing politik. Sebuah strategi yang nantinya dilakukan juga tak menutup kemungkinan akan ditiru oleh pesaing politik lainnya. Namun strategi politik seperti *political branding*, kebijakan dan isu politik biasanya tidak dapat ditiru secara keseluruhan dan hanya garis besarnya saja. Hal tersebut dipengaruhi oleh brand yang ditawarkan oleh pihak tertentu memiliki ciri khas tersendiri yang sudah pasti berbeda dengan pihak lainnya. Peter Schroder juga menjelaskan mengenai strategi politik yang didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita, bahwa cita-cita tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Berikut merupakan jenis-jenis strategi politik (Schroder, 2013).

#### 1) Strategi Ofensif

Strategi ofensif (menyerang) biasanya digunakan oleh partai apabila menginginkan peningkatan dalam jumlah pemilihnya. Berhasilnya kampanye ditentukan apabila ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan yang positif kepada partai yang sebelumnya dibandingkan. Strategi ofensif yang digunakan ketika kampanye pemilu juga hendaknya menampilkan suatu perbedaan yang jelas dan menarik masyarakat dan pendukung partai pesaingnya.

Strategi ofensif dibagi menjadi dua yaitu, strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Pertama, strategi perluasan pasar bertujuan untuk membentuk basis cadangan kelompok pemilih baru di samping basis tetap yang sebelumnya sudah ada. Strategi ini juga diterapkan dalam kampanye dengan tujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kepada publik tentang keunggulan program serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum.

Kedua, strategi menembus pasar adalah strategi yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dari kandidat yang sebelumnya sudah dipilih oleh partai agar potensinya dapat digali secara optimal. Beberapa hal yang perlu untuk digali potensinya ialah melalui sisi kelebihan kandidat seperti kemampuannya dalam *public speaking*, berorganisasi, mengatur sebuah komunitas dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan melalui metode eksplorasi target pemilih dimana dalam keberhasilannya sebelumnya sudah diperoleh. Menurut Schroder, kedua pola strategi ofensif tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Gunawan, 2020).

- a) Selalu berusaha menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik terhadap lawan politik yang ingin diambil alih pemilihnya
- b) Selalu menonjolkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat bila mendukung pihaknya
- c) Selalu berusaha menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya yang tidak ditemukan pada pihak pesaing.
- d) Senantiasa berusaha menjadi penyempurna dari program-program yang dimiliki oleh pesaing.
- e) Selalu menjanjikan perubahan.

## 2) Strategi Defensif

Strategi defensif yaitu apabila partai ingin mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak berkurang pengaruhnya, bisa juga dikatakan bahwa strategi defensif adalah strategi yang digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup, atau menyerahkan pasar. Pada strategi mempertahankan pasar, partai pendukung pemerintahan melakukan upaya untuk menjaga pemilih agar tetap teguh terhadap pilihan mereka sekaligus meyakinkan mereka yang juga pemilih musiman terdahulu agar memilih.

Sementara itu, strategi melepas atau menyerahkan pasar mempunyai dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. Hal semacam ini jarang terjadi, namun yang lebih sering ada padad kasus kedua, yaitu pada pemilu yang menggunakan kertas suara, di mana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, dalam hal ini penyerahan

pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sering terjadi.

Strategi defensif berbeda dengan strategi ofensif, partai-partai yang menggunakan strategi defensif cenderung untuk berupaya agar perbedaan tersebut dapat dikurangi sehingga tidak dapat dikenali oleh pemilih. Akan tetapi dalam keadaan tertentu kedua strategi ini biasanya juga terjadi sekaligus (Subiakto, 2016).

Strategi defensif juga dilakukan melalui berbagai tindakan, yang diantaranya;

- a) Berusaha menjaga dan memelihara pemilih tetap serta memperkokoh solidaritas pemilih agar tidak mudah diambil oleh lawan politik.
- b) Memperkuat pemahaman kepada pemilih terhadap program-program yang sebelumnya sudah mereka anggap berhasil.
- c) Berusaha menjalankan operasi disinformasi, yaitu dengan mengaburkan perbedaan yang ada dengan lawan politik.

Peter Schroder juga menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu juga, kandidat maupun partai politik bisa saja menggunakan kedua strategi ini baik strategi ofensif maupun strategi defensif sekaligus yang sering disebut sebagai strategi campuran/kombinasi.

### 3) Strategi *Positioning*

Sementara itu Newman dan Sheet juga menjelaskan tentang strategi *positioning*, yaitu dengan menggunakan pilihan yaitu bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pasar dan juga dapat dilakukan melalui memperhatikan citra kinerja sebuah kontestan (partai politik maupun kandidat). Terdapat empat pilihan strategi sebagai berikut (Burhanuddin, 2015).

#### a) *Reinforcement strategy* (strategi penguatan)

Strategi ini dapat dilakukan oleh sebuah kandidat yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu. Selain itu strategi ini juga digunakan oleh kontestan yang sebelumnya sudah dipilih melalui pembuktian atas janji-janji politiknya pada saat kampanye. Komunikasi difokuskan kepada orang-orang yang dulu memilih kontestan ini dengan pesan bahwa "pilihan anda dulu itu sudah tepat dan tetaplah membuat pilihan yang sama untuk pemilihan saat ini".

#### b) *Rationalization strategy* (strategi rasionalisasi)

Strategi ini diambil ketika kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut. Rasionalisasi strategi ini perlu diambil agar tidak mematikan citra di mata pemilih ketika pilkada nanti berlangsung.

c. *Inducement strategy* (strategi bujukan)

Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya, atau bisa dikatakan strategi ini diterapkan apabila citra seorang kandidat tidak sesuai dengan persepsi masyarakat meski kinerjanya cukup baik di mata pemilih.

d) *Confrontation strategy* (strategi konfrontasi)

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Bisa saja pada suatu pemilu, sebagian pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang jelek, tetapi ternyata kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan.

## 1.6. Institusionalisasi Partai Politik

Vicky Randall dan Lars Svavand (2002) mencoba memberikan penjelasan tentang pelebagaan partai. Pelebagaan partai politik merupakan proses penetapan partai politik baik secara struktural dalam rangka. Mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempola sikap maupun budaya. (*the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)” (Ridha, 2016). Proses pelebagaan ini dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan menghasilkan sebuah tabel empat sel yaitu :

1. Derajat kesisteman (*systemnes*), sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
2. Derajat identitas nilai (*value infusion*), suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.
3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.
4. Derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*), sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural (Ridha, 2016).

Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan institusionalisasi partai politik sebagai sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value dan stability tertentu. Pendapat Huntington itu mencoba menjelaskan bahwa salah satu indikator kekuatan institusionalisasi partai ialah keberhasilannya memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya hingga terjadi stabilitas internal dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svason adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (Hidayat, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, ada dua aspek yang terkandung dalam proses institusionalisasi, yakni aspek struktural-kultural dan aspek internal-eksternal.

Pertama, Derajat Kesisteman atau systemness merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam AD dan ART partai politik. Derajat kesisteman sangat krusial dalam menentukan sehat-tidaknya partai politik karena berkaitan dengan proses berjalannya fungsi-fungsi partai, mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik internal. Dalam hal ini, kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi sangat penting. Hal ini karena semua fungsi dan mekanisme partai harus dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang telah disepakati dan ditetapkan. AD/ART itu sendiri wajib dimuat dalam akta notaris pendirian partai politik ketika partai didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.

Kedua, Derajat Identitas Nilai, berkaitan dengan ideologi atau platform partai, berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai tersebut. Derajat identitas nilai suatu partai berkaitan dengan hubungan partai dengan kelompok populis (popular group) tertentu, apakah suatu partai mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, baik berdasarkan kelas maupun komunitas agama atau etnik tertentu (Romli, 2008).

Ketiga, Derajat Otonomi. Derajat otonomi lebih menekankan aspek relasi antara partai dengan aktor di luar partai, baik sumber otoritas seperti penguasa maupun pemerintah, atau sumber dana misalnya, pengusaha, penguasa, negara, atau lembaga luar lainnya serta sumber dukungan massa seperti organisasi masyarakat. Hal yang terpenting dalam dimensi ini adalah: Pertama, apakah partai tergantung pada aktor luar tersebut. Kedua, apakah keputusan partai turut ditentukan oleh aktor luar. Idealnya, partai politik tersebut melembaga apabila semua keputusan partai yang dibuat partai terbebas dari intervensi pihak luar (Wahid, 2018).

Keempat, Derajat reifikasi atau derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik (Susanto, 2018). Keberadaan partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Prattama, 2015). Dimensi citra opini publik merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan partai menanamkan keberadaan, citra atau brand name pada imajinasi publik seperti yang dimaksudkan oleh partai melalui dimensi identitas nilai mereka.

### **1.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengacu pada studi, eksperimen, atau investigasi yang telah dilakukan pada topik tertentu sebelum penelitian saat ini. Studi-studi ini memberikan landasan bagi penelitian baru dengan menawarkan wawasan, data, dan temuan yang dapat dikembangkan atau ditantang. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, menilai validitas temuan yang ada, dan mengembangkan pertanyaan penelitian baru. Proses ini membantu memastikan bahwa penelitian baru berkontribusi pada pengetahuan yang ada dan memajukan bidangnya. Dalam penulisan akademis, penting untuk mengakui dan mengutip penelitian terdahulu untuk menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang topik tersebut dan untuk memberikan penghargaan kepada peneliti asli. Berikut beberapa studi tentang strategi partai politik menghadapi pemilu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajri Hasan Efendi Pada tahun 2021 dalam mengkaji tentang Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). Pada level Kabupaten Aceh Selatan, perjuangan partai Gerindra tahun 2009 tanpa kemenangan. Berbeda dengan beberapa Kabupaten lain yang telah berhasil mencetak dan mengirim kadernya baik dipangung DPRK, DPRA dan DPRD. Lanjut dipertarungan tahun 2014, Gerindra baru berhasil membawa 1 legislatif ke DPRK Aceh Selatan yang bernama Hadi Surya S.TP., MT dengan perolehan suara 1096. Namun di DPRA masih belum mendapatkan kursi untuk dapil 9 (Aceh Selatan, Abdya, Subulussalam dan Aceh Singkil). Perubahan yang lumayan signifikan untuk pertarungan lokal terjadi pada Pemilu kemarin yaitu periode 2019-2024, perolehan suara untuk partai Gerindra sangat luar biasa, bahkan untuk pertarungan calon presiden, rekapitulasi hasil suara menunjukkan Provinsi Aceh memberikan 85,59 % dari total suara untuk pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Sumber: CNN Indonesia.Com). Sedangkan

untuk perolehan kursi calon legislatif, Kabupaten Aceh Selatan Gerindra berhasil mengusung 2 orang kadernya menjadi wakil rakyat ke DPRK dan 1 orang kader menuju DPRA bahkan berhasil mengambil posisi sentral sebagai wakil ketua DPRA. Pertarungan 2019-2014 perolehan suara Gerindra merupakan suara tertinggi di Kabupaten. Untuk Perolehan suara badan (caleg) tertinggi diraih Hadi Surya S.TP., MT (Gerindra) dengan jumlah suara 1.875, dan suara total partai 2.377. Sedangkan di DPRA, Gerindra Aceh Selatan berhasil mengirimkan kadernya yang bernama Safaruddin S.Sos untuk menduduki parlemen dan mengambil posisi penting sebagai Wakil Ketua DPR Aceh.

Proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan adalah melalui pengkaderan umum dan pengkaderan khusus. Pengkaderan umum yaitu Pengkaderan yang ditujukan untuk kader madya. Kader Madya adalah kader penggalang dan kader fungsional. Salah satu bentuk pengkaderan umum yang telah dilaksanakan Partai Gerindra Aceh Selatan adalah konsolidasi. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Partai Gerindra Aceh Selatan dan kader-kader tingkat seKecamatan. Sedangkan pengkaderan khusus yaitu untuk kader-kader yang ditargetkan untuk mencapai posisi-posisi strategi dalam pemilu yaitu sebagai calon anggota legislatif. Keberhasilan penambahan kursi dewan dari Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan sangat dipengaruhi oleh fungsi kaderisasi dari partai. Penambahan kursi dewan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan dari 1 kursi pada Pileg 2014 menjadi 2 kursi pada Pileg 2019 dan mendapatkan posisi sentral yaitu sebagai wakil ketua DPR Aceh adalah merupakan hasil kaderisasi yang baik yang telah diupayakan oleh DPC Partai Gerindra Aceh Selatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasruddin Nur, Adi Sumandiyar, dan Mutiara Rezkika Yanto pada tahun 2022 dalam mengkaji tentang Peningkatan Perolehan Kursi Partai Nasdem Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros. Partai NasDem di kabupaten Maros merupakan Partai yang struktur Organisasinya lengkap karena merambah sampai ke pelosok Desa-desa, selain itu, yang menjadi pengurus Partai ini di kabupaten Maros khususnya ditingkat Desa dan Kecamatan kebanyakan adalah tokoh Masyarakat dan tokoh Agama, kemudian untuk persaingannya itu sendiri para pengurus partai dan caleg dari Partai NasDem ini tidak henti-hentinya melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri. Pengurus Partai NasDem di tingkat kecamatan dan desa merupakan tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat, jadi hal ini pula yang merupakan strategi Partai NasDem yang menempatkan anggota-anggota dalam struktur kepengurusan, karena beranjak dari pernyataan diatas yang menyatakan di Maros tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga gampang melakukan pendekatan, apalagi yang melakukan

pendekatan adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menerimanya termasuk dalam hal politik.

Selain kekuatan Kader yang dimiliki, strategi juga merupakan faktor pendukung peningkatan perolehan kursi Partai NasDem di kabupaten Maros pada pemilu Anggota Legislatif 2019, Strategi politik adalah hal yang mutlak dan harus dimiliki setiap partai politik dalam upaya untuk memenangkan pemilu. Sama halnya dengan senjata dalam menghadapi sebuah pertarungan, maka strategi juga sangat penting untuk mendukung dan membuka peluang dalam memenangkan sebuah pertarungan. Tanpa adanya strategi yang baik, maka peluang untuk memenangkan sebuah pertarungan juga akan semakin kecil. Pada pemilu 2019 di kabupaten Maros, dapat dipastikan bahwa setiap partai politik memiliki strategi masing-masing untuk menarik simpati dari masyarakat, semakin banyak simpati yang mereka terima dari masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan pemilu. Pemilu anggota Legislatif itu dapat dijadikan ajang pertunjukan dan persaingan strategi setiap partai politik dalam usaha untuk mencapai tujuan partainya. Ada beberapa strategi politik yang dilakukan Partai NasDem pada pemilu tahun 2019, diantaranya adalah mendekati diri kepada masyarakat, dan ideologi islam yang dimiliki sebagai dasar perjuangan partai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farida Hidayati pada tahun 2022 dalam mengkaji Peningkatan Elektabilitas Partai Daerah Aceh (PDA) Pada Pileg Tahun 2019 Di Provinsi Aceh. PDA merupakan salah satu partai politik lokal yang ada di Aceh dan sudah tiga kali mengikuti pemilu yaitu pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilu tahun 2019 PDA mengalami peningkatan perolehan suara sebanyak 21.262 suara dan memperoleh 3 kursi di tingkat DPRA. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009 dan 2014 dimana PDA tidak pernah memperoleh kursi lebih dari 1 kursi selama mengikuti pemilu dan menyebabkan PDA harus tiga kali mengubah nama dari Partai Daulat Aceh, Partai Damai Aceh dan Partai Daerah Aceh agar dapat mengikuti pemilu, dikarenakan PDA tidak dapat melewati ambang batas. dimana pada pemilu 2009 dan 2014 PDA hanya merekrut pengurus maupun kadernya dari kalangan dayah, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap perolehan suaranya, meskipun rakyat Aceh dikenal nuansa keulamaanya. sedangkan pada pemilu 2019 PDA mulai merekrut orang-orang non dayah yang dijadikan sebagai pengurus maupun kader yaitu terdiri dari kalangan umum seperti pengusaha, akademisi, anak muda maupun mahasiswa.

Kader-kader yang diusung oleh PDA pada pemilu 2019 terdiri dari kalangan pengusaha, akademisi dan juga tokoh masyarakat dan hal ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Aceh walaupun Positioning (penempatan) partai PDA itu sendiri masih lemah dikalangan masyarakat tetapi figur yang dimiliki para kader

mampu memberikan efek yang baik untuk partai dalam peningkatan elektabilitas partai PDA. Pada pemilu sebelumnya PDA tidak pernah mendapat kursi lebih dari 1 kursi di tingkat DPRA selama mengikuti pemilu di Aceh. Dari teori marketing politik dan teori rekrutmen politik, PDA mengalami peningkatan elektabilitas di pemilu 2019, dimana PDA mendapatkan 3 kursi di tingkat DPRA, hal ini karena PDA mulai membuka diri terhadap kalangan umum yang terdiri dari mahasiswa, anak muda, pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat atau ulama dan lain sebagainya, pada pemilu tahun 2019 PDA juga memperluas sosialisasi politik baik melalui non media maupun media sosial seperti mengunjungi masyarakat, mengadakan pengajian, mengunjungi Dayah - dayah dan memberikan pengobatan gratis dan juga kegiatan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Aceh secara langsung dan lain sebagainya. Dari beberapa hal atau kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh PDA terhadap masyarakat yang membuat masyarakat tertarik pada partai PDA sehingga lambat laun masyarakat mengerti apa visi misi dari partai PDA itu sendiri dan juga masyarakat sudah mulai menyadari perkembangan dari partai PDA dan apa sebenarnya peranan fungsi dan juga memahami nilai-nilai yang terkandung dalam PDA itu sendiri.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini memiliki perbedaan dimana fokus penelitian yang melihat strategi partai politik didasarkan pada asumsi pengaruh dari kepemimpinan dalam sebuah partai. Kepemimpinan ini dipegang oleh figur yang memiliki pengaruh di masyarakat karena reputasinya sekalipun belum punya pengalaman politik sebelumnya. Hal inilah yang terjadi pada Partai Golkar Kabupaten Bantaeng. Di bawah pimpinan Ir. Liestiaty Nurdin, perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng meningkat dari 2 menjadi 4 kursi, sekaligus menjadi catatan sejarah pertama kalinya Partai Golkar Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan kursi dalam kurun waktu 1999-2024.

### **1.8. Kerangka Berpikir**

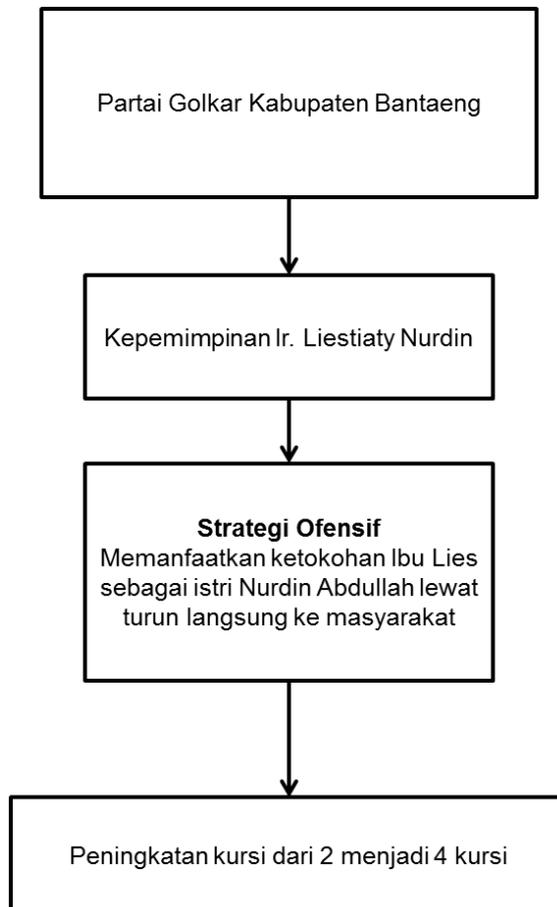
Dalam melakukan penelitian, memiliki kerangka berpikir yang jelas sangatlah penting. Kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik membantu peneliti mengatur pemikiran mereka, memfokuskan upaya mereka, dan memandu pengambilan keputusan selama proses penelitian. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan pertanyaan penelitian, merancang metodologi, dan menganalisis data. Dengan menetapkan pendekatan terstruktur terhadap penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka masuk akal secara metodologis dan kesimpulan mereka didukung dengan baik. Kerangka pemikiran yang kuat berkontribusi pada kredibilitas dan ketelitian temuan penelitian.

Partai Golkar adalah salah satu partai yang memiliki andil besar dalam perpolitikan di Kabupaten Bantaeng. Hingga Pemilu 2009, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu di DPRD Kabupaten Bantaeng. Namun pada Pemilu 2014 Partai

Golkar tidak lagi menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Bantaeng hingga Pemilu 2024 yang baru dilaksanakan. Kursi Partai Golkar cenderung mengalami penurunan. Pada Pemilu 2024, Partai Golkar mengalami kembali peningkatan jumlah kursi dari 2 menjadi 4 kursi. Penambahan kursi ini menjadi hal pertama yang dialami Partai Golkar Kabupaten Bantaeng selama pemilu di era Reformasi. Pada Pemilu 2019 Partai Golkar hanya mendapat kursi di Daerah Pemilihan 2 dan 3. Pada Pemilu 2024 Partai Golkar berhasil kembali mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 1 dan 4 sehingga Partai Golkar Kabupaten Bantaeng mendapatkan 1 kursi di setiap dapil. Faktor kepemimpinan Ir. Liestiaty F. Nurdin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng dianggap mendukung penambahan suara dan kursi Partai Golkar karena memiliki status sebagai istri dari Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang dikenal akan hasil-hasil pembangunannya selama menjabat, sehingga menarik minat masyarakat untuk memilih Partai Golkar.

Sebagai sebuah partai politik, tentu ada langkah dan strategi yang diambil oleh Partai Golkar Kabupaten Bantaeng di Pemilu 2024. Strategi tersebut diutamakan untuk menambah perolehan suara dan kursi, sehingga cenderung bersifat strategi ofensif untuk menarik minat pemilih. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang diambil oleh Partai Golkar untuk menambah perolehan kursi DPRD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng di Pemilu 2024.

### 1.9. Skema Berpikir



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menguraikan pendekatan dan tipe penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

#### **2.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data untuk dapat menjelaskan bagaimana strategi yang diambil oleh Partai Golkar untuk menambah perolehan kursi DPRD Kabupaten Bantaeng di Pemilu 2024.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik. Tipe penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Penelitian ini mendeskripsikan strategi apa saja yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bantaeng untuk mencapai hasil positif di Pemilu 2024 (Nasution, 2003).

#### **2.2. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Kabupaten Bantaeng. Pemilihan kabupaten tersebut didasarkan pada hasil Pemilu sejak tahun 1999 hingga 2019 dimana Partai Golkar yang sebelumnya adalah partai pemenang selalu mengalami penurunan suara hingga hanya memiliki 2 kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng. Namun, pada Pemilu 2024 untuk pertama kalinya suara Partai Golkar kembali naik dan mampu menambah 2 kursi sehingga total menjadi 4 kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng secara merata di setiap dapil.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Penelitian ini menitikberatkan objek penelitian pada DPD Partai Golkar

Kabupaten Bantaeng, khususnya pada figur ketua Ir. Liestiaty Nurdin. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, beliau mampu berkontribusi menambah perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bantaeng. Hal ini didukung oleh popularitas dari suaminya, Nurdin Abdullah, yang adalah mantan Bupati Bantaeng dan Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2020 (Kriyantono, 2014).

### **2.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai berikut.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan yaitu pihak Partai Golkar Kabupaten Bantaeng. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara diolah menggunakan metode triangulasi, dimana hasil wawancara informan sebelumnya dikonfirmasi kebenarannya dan diperkaya pada jawaban informan lainnya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang dapat berasal dari berbagai tulisan, media, dan publikasi kegiatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berita di media online yang berkaitan dengan Partai Golkar Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi Pemilu 2024. Data sekunder akan menjadi sumber data bagi peneliti untuk memperkuat apa yang diperoleh dari data primer (Bungin, 2017).

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu :

#### **1. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara mendalam, dimana ada proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur. Wawancara diarahkan mengenai bagaimana strategi yang

diambil oleh Partai Golkar untuk menambah perolehan kursi DPRD Kabupaten Bantaeng di Pemilu 2024, sesuai rencana pertanyaan utama yang telah disusun, dan bila informan memberikan jawaban yang menarik untuk digali maka peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi berupa data sekunder seperti arsip, dokumen, laporan, berita, gambar, maupun berbagai tulisan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara terhadap peningkatan perolehan kursi DPRD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng di Pemilu 2024 (Moleong, 2017).

## 2.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data (Zellatifanny, 2018). Adapun informan yang telah terlibat dalam penelitian ini yaitu :

No.	Informan Penelitian
1.	Kamaruddin, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng
2.	Muhammad Said, anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
3.	Saefullah, anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
4.	Reski Wijaya, anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
5.	H. Sudarman, anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
6.	Andi Muhammad Ramli, tokoh masyarakat
7.	Nasruddin Upel, pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan
8.	Nasruddin, masyarakat Kabupaten Bantaeng

## 2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan itu, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut. Dalam analisis data kualitatif ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.